



KEBIJAKAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BIDANG KEARSIPAN



OLEH :
DR. SUGENG HARIYONO
KEPALA BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI





URUSAN PEMERINTAHAN

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

ABSOLUT

- 1. PERTAHANAN
- 2. KEAMANAN
- 3. AGAMA
- 4. YUSTISI
- 5. POLITIK LUAR NEGERI
- 6. MONETER & FISKAL

- 1. PENDIDIKAN
- 2. KESEHATAN
- 3. PU DAN PR
- 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN
- 5. TRAMTIBUM & LINMAS
- 6. SOSIAL

KONKUREN

WAJIB (24)

PILIHAN (8)

YAN DASAR (6)

Hanya Sebagian Substansinya

SPM

PEMERINTAHAN UMUM

NON YAN DASAR (18)

NSPK

Substansi yang tidak masuk SPM

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan

18. Kearsipan

Pilihan

8 URUSAN:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.



ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA STRATEGIS MANAJEMEN KEARSIPAN 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN

- 1 Peningkatan ketersediaan informasi kearsipan yang autentik dan utuh guna mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara dan simpul pemersatu bangsa
- 2 Peningkatan keselamatan dan keterlindungan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa
- 3 Peningkatan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah
- 4 Peningkatan kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan pemerintahan

AGENDA STRATEGIS

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penataan arsip
- Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap informasi kearsipan (SIKN- JIKN)
- Meningkatkan pemanfaatan informasi kearsipan dan pemenuhan konten kearsipan (SIKN-JIKN)
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kearsipan
- Meningkatkan implementasi sistem pengelolaan arsip berbasis TIK (SIKD)
- Meningkatkan pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa
- Meningkatkan peran arsip pada pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- Meningkatkan fungsi kelembagaan kearsipan khususnya di daerah
- Meningkatkan kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan (*knowledge management*) berbasis TIK dengan Big Data



ISU STRATEGIS URUSAN KEARSIPAN



Jumlah SDM Kearsipan yang belum sesuai kebutuhan dan belum merata serta masih rendahnya kompetensi SDM Kearsipan.

sebagai perwujudan tata kelola administrasi pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien serta pondasi manajemen pengetahuan pemerintah

01
Penataan
Kelembagaan dan
Kebijakan/Regulasi

Belum optimalnya penataan kelembagaan daerah dan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU 43/2009 tentang Kearsipan.

02
Pemenuhan
Kebutuhan SDM
Kearsipan

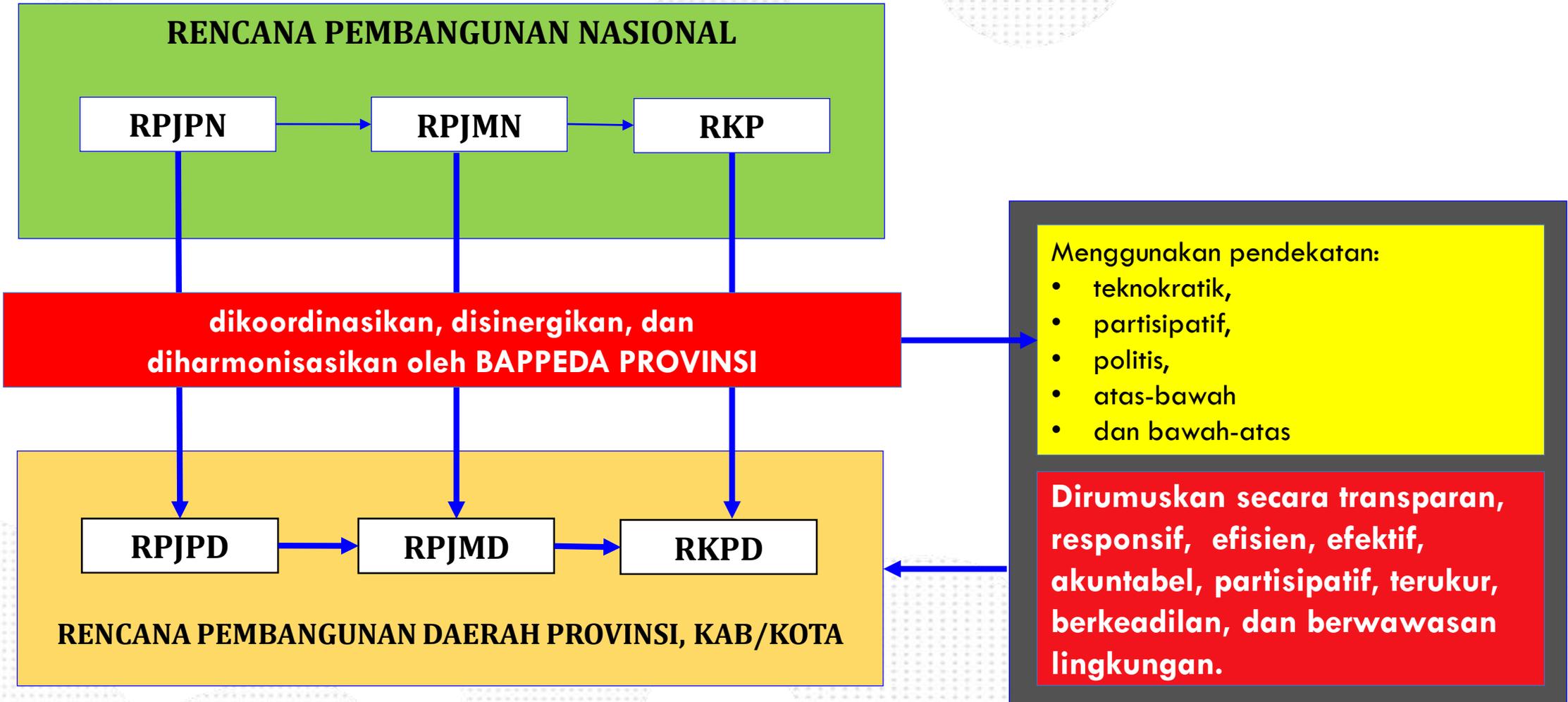
Pelayanan arsip sebagai memori kolektif bangsa dengan membangun sistem yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk penguatan identitas dan jati diri bangsa

03
Pemanfaatan dan
Pelayanan
Kearsipan

04
Pengembangan
aplikasi Srikandi



Mekanisme Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pusat - Daerah

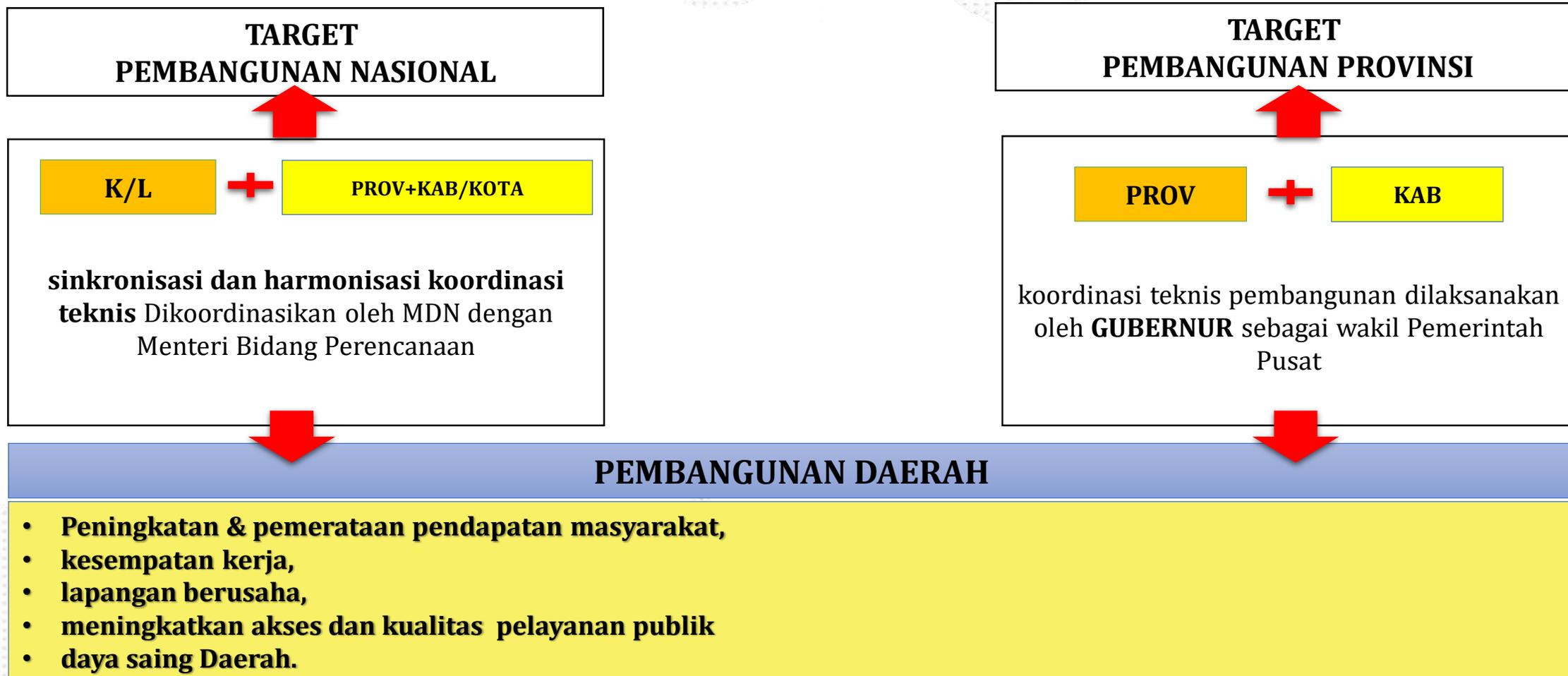




Sinkronisasi Program Prioritas Pusat – Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014

(Psl 258, 259, 260)





PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN





LAMPIRAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis lembaga negara, BUMN, dan perguruan tinggi negeri.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh lembaga negara di Pusat dan Daerah, BUMN, organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, organisasi politik tingkat nasional, tokoh nasional dan perusahaan swasta yang</p>	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan</p>	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi</p>



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>memiliki arsip bernilai guna sejarah yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan laporan dan salinan otentik naskah asli arsip terjaga dari lembaga negara, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD.</p> <p>d. Pengelolaan informasi Kearsipan dalam SIKN melalui JIKN.</p>	<p>tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi.</p>	<p>kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.</p>



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Persetujuan tertulis jadwal retensi arsip (JRA) lembaga negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perguruan tinggi negeri.</p> <p>b. Persetujuan tertulis pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, BUMN, perguruan tinggi swasta dan perusahaan swasta yang kegiatannya</p>	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Melakukan autentikasi</p>	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan</p>



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>dibiayai dari anggaran negara atau bantuan luar negeri yang memiliki retensi sekurang-kurangnya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>c. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala nasional.</p> <p>d. Penyelamatan arsip lembaga negara yang digabung dan/atau dibubarkan.</p>	<p>arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi.</p> <p>g. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>	<p>dan Desa/kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>e. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga Kearsipan Nasional.</p> <p>f. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>		
3.	Akreditasi dan Sertifikasi	a. Akreditasi kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, Pemerintahan		



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>Daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD.</p> <p>b. Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara jasa kearsipan, pendidikan kearsipan, dan diklat kearsipan.</p> <p>c. Sertifikasi arsiparis yang mengikuti uji kompetensi.</p> <p>d. Penetapan tunjangan profesi arsiparis.</p>		
4.	Formasi Arsiparis	Penetapan hasil analisis kebutuhan arsiparis nasional.		



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di ANRI.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.



DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEARSIPAN OLEH PEMERINTAH DAERAH





INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Berdasarkan Permendagri No. 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 	<p>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	$T = (a + i + s + j)/4$ <p>T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	50%
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip 	<p>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan</p>	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ <p>T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan</p>	50%



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	
4.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK	
5.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	
6.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip	



ARAH KEBIJAKAN URUSAN PEMDA BIDANG KEARSIPAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 40 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2021



1. Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah kepada masyarakat.

- Keberadaan dan kelengkapan khazanah arsip daerah
- Tata laksana pelayanan arsip
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang pelayanan arsip
- Ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip
- Ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan arsip

2. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan arsip daerah.

- Tata laksana pemanfaatan arsip oleh masyarakat
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang pemanfaatan arsip
- Kemasan penyajian informasi kearsipan kepada masyarakat
- Peran aktif lembaga kearsipan daerah sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
- Tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan arsip

3. Perlindungan dan penyelamatan arsip terjaga dan arsip statis daerah

- Keberadaan dan kelengkapan daftar arsip yang perlu dipreservasi
- Tata laksana preservasi arsip
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang preservasi arsip
- Ketersediaan prasarana dan sarana preservasi arsip

4. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah termasuk desa berbasis digital

- Tata laksana pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah termasuk desa
- Pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip negara
- Kualitas pengelolaan arsip vital dan aset daerah
- Ketersediaan instrumen pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara digital
- Kompetensi SDM kearsipan daerah bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- Ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip secara digital

5. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah.

- Kualitas penyelenggaraan kearsipan di daerah
- Tata laksana pengawasan kearsipan internal daerah
- Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal daerah oleh lembaga kearsipan daerah
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang pengawasan kearsipan

6. Peningkatan kapabilitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan di daerah

- Tata laksana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan di daerah
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang penyelenggaraan kearsipan
- Ketersediaan sumber daya pendukung penyelenggaraan kearsipan di daerah



ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022

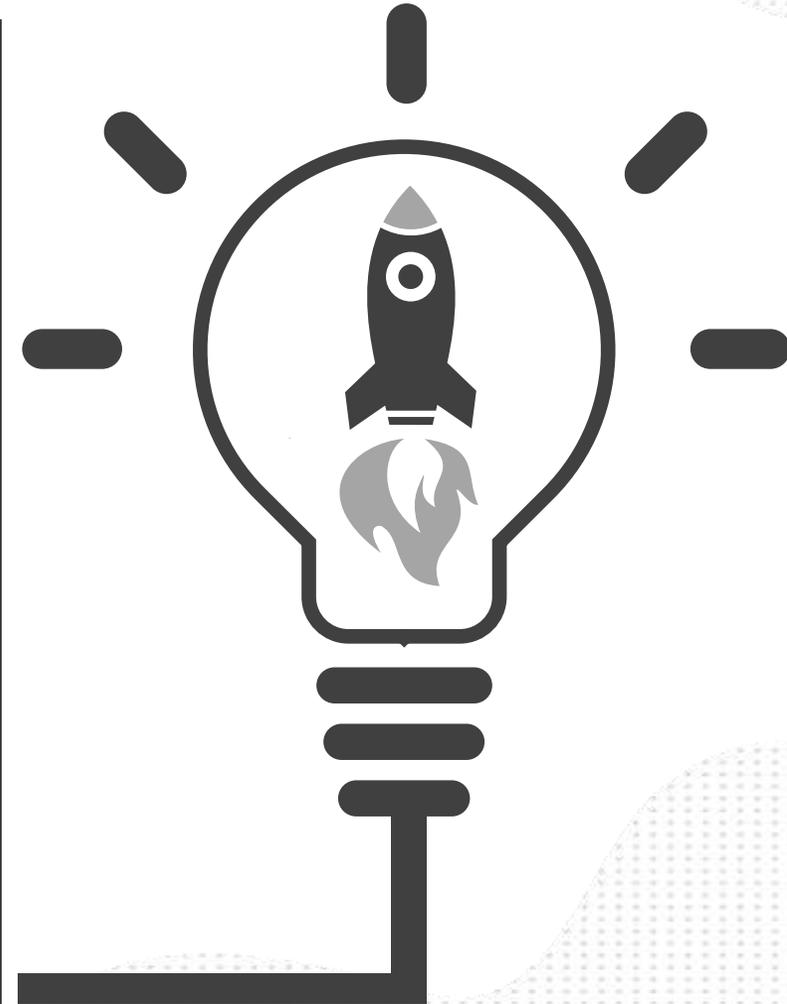
No	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148.880 Arsip
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	170.362 Orang



TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM Mendukung Pembangunan Arsip Daerah

GUBERNUR dan BUPATI/WALIKOTA

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung Tertib Arsip;
- b. Mensinkronkan target pembangunan daerah dengan pembangunan nasional melalui dukungan program kegiatan;
- c. Penguatan sarana prasarana penyelenggaraan kearsipan di daerah;
- d. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dengan pada perangkat daerah provinsi dan pada Kabupaten/Kota dalam:
 - 1) penyusunan atau penyempurnaan kebijakan kearsipan;
 - 2) optimalisasi tugas dan fungsi lembaga kearsipan dan unit kearsipan pada tiap perangkat daerah;
 - 3) peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis;
 - 4) penyusunan daftar arsip bagi tiap perangkat daerah;
 - 5) pembangunan depot arsip pada lembaga kearsipan dan standardisasi prasarana dan sarana kearsipan pada tiap perangkat daerah.





ISU DAN KENDALA PEMDA

Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana kearsipan dan Pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19

Ketersediaan Arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi yang masih terbatas

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa

kurangnya kesadaran dari pencipta arsip dalam melakukan penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan arsip sesuai dengan kaedah kearsipan





TERIMA KASIH





Desa Bisa

SDGs DESA MEMPERCEPAT OPTIMALISASI TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA

Bito Wikantosa

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan



LATAR BELAKANG KEHADIRAN KEBIJAKAN SDGs DESA

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Agar Desa berdaya dalam menjalankan kewenangannya, Undang-Undang Desa memandatkan Desa berhak memperoleh sumber-sumber pendapatan.
- Sumber pendapatan Desa antara lain: Dana Desa yang bersumber dari APBN

Arahan Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2019:

1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah
2. Dana Desa harus berdampak pada peningkatan Ekonomi dan SDM Desa

AGENDA GLOBAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA :
Sustainable Development Goals (SDGs)
Ikrrar SDGs: *No One Left Behind*

MELOKALKAN SDGs GLOBAL KE SDGs DESA UPAYA PERCEPATAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Merujuk Perpres 59/2017, maka disusun SDGs Desa
- SDGs Desa berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PERMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

“Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa”

Urgensi SDGs Desa ke-18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

- mengkotekskan SDGs Desa agar tumbuh rasa kepemilikan dalam diri warga lokal sehingga mempercepat bergulirnya roda pembangunan Desa itu sendiri
- mempertemukan warga Desa dengan program-program pembangunan sehingga tumbuh kearifan lokal Desa sebagai hasil keterpaduan adat dan kebiasaan setempat dengan proses-proses pembangunan, hasil, manfaat dan dampaknya

Unsur Kunci Implementasi SDGs Desa

Kelembagaan Desa

Dinamis Kelembagaan yang dinamis bersedia mengikuti data terbaru sehingga lincah menyusun kebijakan sesuai dengan data mutakhir. Lembaga sekaligus wahana pengambilan keputusan bersama yang tertinggi adalah musyawarah Desa.

Proses dialog senantiasa berlangsung selama musyawarah Desa. Warga Desa harus membahas desain pembangunan secara aktif desain pembangunan secara aktif, dengan mengikuti musyawarah Desa. Setelah ide disepakati, disusunlah rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan

Budaya Desa Adaptif

SDGs Desa menyoroti kapasitas budaya untuk adaptif terhadap sudut pandang baru. Budaya adaptif membuka kesadaran akan data dan informasi, sehingga membuka peluang menggunakannya untuk membangun Desa menjadi lebih maju

SDGs 18: KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF



Dasar pemikiran munculnya SDGs 18

- Menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dll.
- Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang

Budaya merupakan sebuah cara hidup yang dimiliki bersama oleh sekelompok manusia dalam mengelola kehidupan (manusia dengan manusia - interaksi) dan penghidupan (manusia dengan alam - kerja), yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi, dan menjadi sebuah “kesepakatan nilai rasa bersama”, serta memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing.

Lumbung Budaya adalah suatu kumpulan sumberdaya budaya yang dimiliki bersama dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Inti dari praktik lumbung (atau membangun *commons*) adalah semangat gotong royong untuk memajukan budaya Desa untuk kepentingan bersama (Prof Dr. Melani Budianta)

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN DESA : Menerapkan SDGs di Desa = SDGs DESA



SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA : JALAN KEBUDAYAAN

- Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif dikonkritkan dengan mengubah pola pembangunan Desa dari "kompetisi usulan" antar kelompok kepentingan menjadi pembangunan Desa sebagai "gotong royong mengatasi masalah di Desa dan/atau mendayagunakan sumberdaya Desa untuk kesejahteraan hidup".
- Desa sebagai komunitas gotong royong diperkuat melalui jalan kebudayaan. Desa berkewajiban menghidupkan dan memelihara "Lumbung Kebudayaan Desa".
- Budaya merupakan sebuah cara hidup yang dimiliki bersama oleh sekelompok manusia, yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi, dan menjadi sebuah "kesepakatan nilai rasa bersama", serta memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing.
- Kearifan lokal Desa sebagai hasil keterpaduan adat dan kebiasaan setempat menjadi landasan penyelenggaraan Desa yang digerakkan dengan semangat gotong royong.
- Tiap Desa tentu mempunyai kesejarahan yang berbeda-beda, lokalitas dan keunikannya sendiri yang terkait dengan alam lingkungannya, mata pencaharian penduduknya, nilai-nilai, tradisi, bahasa, kesenian, serta praktik budaya dan keseharian kehidupannya.
- Temu Kenali Budaya Desa :
Gotong royong temu kenali budaya Desa dilakukan dengan cara menggali, menemukan dan mengenali kembali sejarah kebudayaan Desa. Kebudayaan Desa bersifat menyebar. Beragam, potensi budaya Desa dilacak dalam sejarah Desa agar ditemukan beragam kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul.

TEMU KENALI BUDAYA DESA :

- sumber daya alam dan sarana pendaayagunaannya;
- sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan, kemampuan, minat, bakat, dll)
- aktivitas budaya beragam kelompok masyarakat (minat yang sama antar warga Desa)
- sejarah Desa
- warisan budaya
- permasalahan kebudayaan Desa (perubahan perilaku sosial, pergeseran nilai budaya, dll)
- harapan-harapan warga mayarakat Desa tentang pemajuan kebudayaan Desa.

PELAKSANAAN SDGs DESA ke-18: KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF MENSYARATKAN ADANYA TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA

PERMENDESA-PDPT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

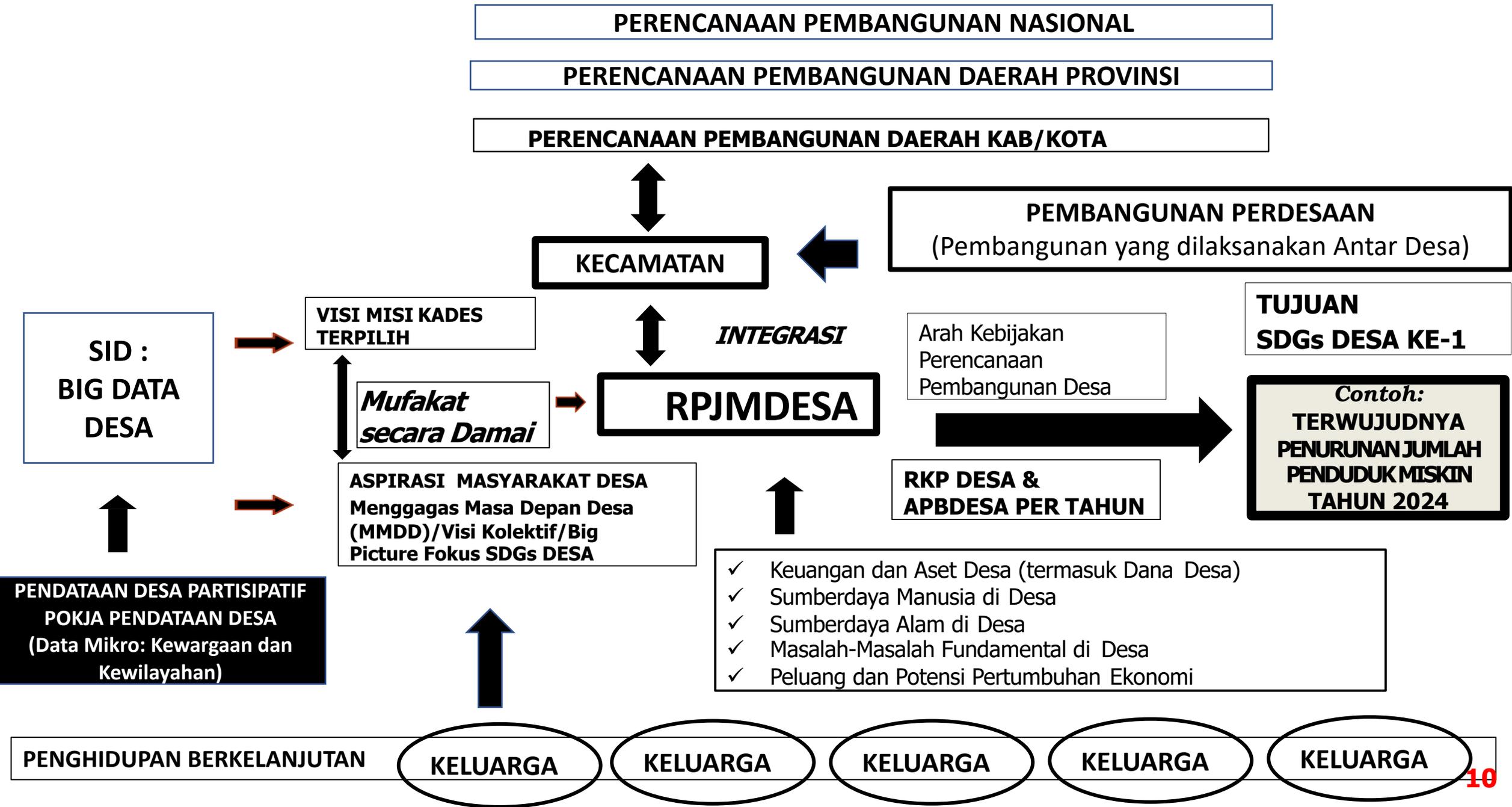
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

1. arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Pembangunan Desa;

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendataan Desa;
 - b. Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
 - d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa;
 - b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
 - c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
 - d. penguatan budaya Desa adaptif.
 4. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA



PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa.
2. Peta Jalan SDGs Desa paling sedikit memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
3. Kepala Desa memasukkan data dan informasi tentang Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
4. Berdasarkan Peta Jalan SDGs Desa, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyusun program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.
5. Program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Desa.

ESKALASI SDGs DESA

INSTRUKSI MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI PADA RAKER JANUARI 2022

- Mendetailkan sampai berbentuk rencana kerja bulanan, berikut keterkaitannya dengan IKU dan tujuan SDGs Desa, kemudian dibahas dalam Rapat Kerja Kementerian Desa, PDTT
- Rencana program dan kegiatan setiap unit kerja harus nyata mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa
- **Maksimalkan propaganda/diseminasi SDGs Desa melalui media sosial; eskalasi SDGs Desa ke level nasional (lintas K/L) sehingga program/kegiatan K/L dapat ditagging pada 18 Tujuan SDGs Desa**
- Harus ditetapkan **Indeks Desa**, Indeks Kawasan Perdesaan, status perkembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, status perkembangan kawasan transmigrasi, kemiskinan dan IPM di daerah tertinggal, berikut status pengentasan daerah tertinggal.

PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA : DATA DESA

- SDGs Desa menyederhanakan tata kelola pembangunan Desa untuk berbasis bukti
- Pembangunan Desa dimulai dari tahapan pengumpulan data Desa, menggunakan hasilnya untuk memahami profil Desa, memanfaatkannya untuk menyusun perencanaan pembangunan Desa, memilih prioritas kegiatan dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan SDGs Desa melalui beragam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- Kegiatan pembangunan Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dibiayai dengan keuangan Desa termasuk Dana Desa dan pendayagunaan aset Desa.
- Data SDGs Desa sebagai data mikro kewargaan dan kewilayahan merupakan data utama dalam perencanaan pembangunan Desa.
- Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu aplikasi Sistem Informasi Desa (SID).
- Perencanaan pembangunan Desa juga membutuhkan bukti-bukti mendukung. Misalnya: dokumen administrasi penggunaan Dana Desa, dokumen sertifikat kepemilikan tanah desa, dokumen berita acara musyawarah Desa, dokumen produk hukum desa, dokumen RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa.

PELAKSANAAN SDGs DESA MELALUI TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS BUKTI MENSYARATKAN ADANYA TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI PROSES PEMBELAJARAN SOSIAL

- Undang-Undang Desa mensyaratkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- Pemberdayaan Masyarakat “sejatinya” merupakan proses belajar.
- Pembelajaran SDGs Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD, dan warga Desa dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan tindakan pembacaan, perbincangan maupun penulisan tentang SDGs Desa.
- Masyarakat Desa belajar dari beragam praktik terbaik SDGs Desa dan beragam kegagalan pelaksanaan SDGs Desa
- Beragam praktik terbaik SDGs Desa dan kegagalan pelaksanaan SDGs Desa didokumentasikan agar berfungsi sebagai media pembelajaran.

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENSYARATKAN ADANYA
TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA.**

Tujuan Kearsipan



Urgensi Arsip

- ✓ Arsip menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat;
- ✓ Arsip menjadi bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- ✓ Arsip menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan, sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- ✓ Arsip dapat juga menjadi instrument dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik



Tujuan Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- ✓ Kearsipan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya
- ✓ Kearsipan sebagai perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.

Penyelenggaraan kearsipan dijalankan berdasar **prinsip, kaidah,** dan standar kearsipan, yang **komprensif** dan **terpadu**

Peran Arsip dalam Pengembangan Organisasi



Keberlangsungan hidup organisasi



Basis peningkatan kinerja dan kualitas layanan



Dasar dalam pengembangan organisasi di masa depan



Instrumen akuntabilitas organisasi

Media pembelajaran organisasi

penyelenggaraan kearsipan yang logis dan teratur, sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan organisasi yang **adaptif, responsive, agile** dan **berdaya saing**

Peran Kementerian Desa PDTT Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Desa



1

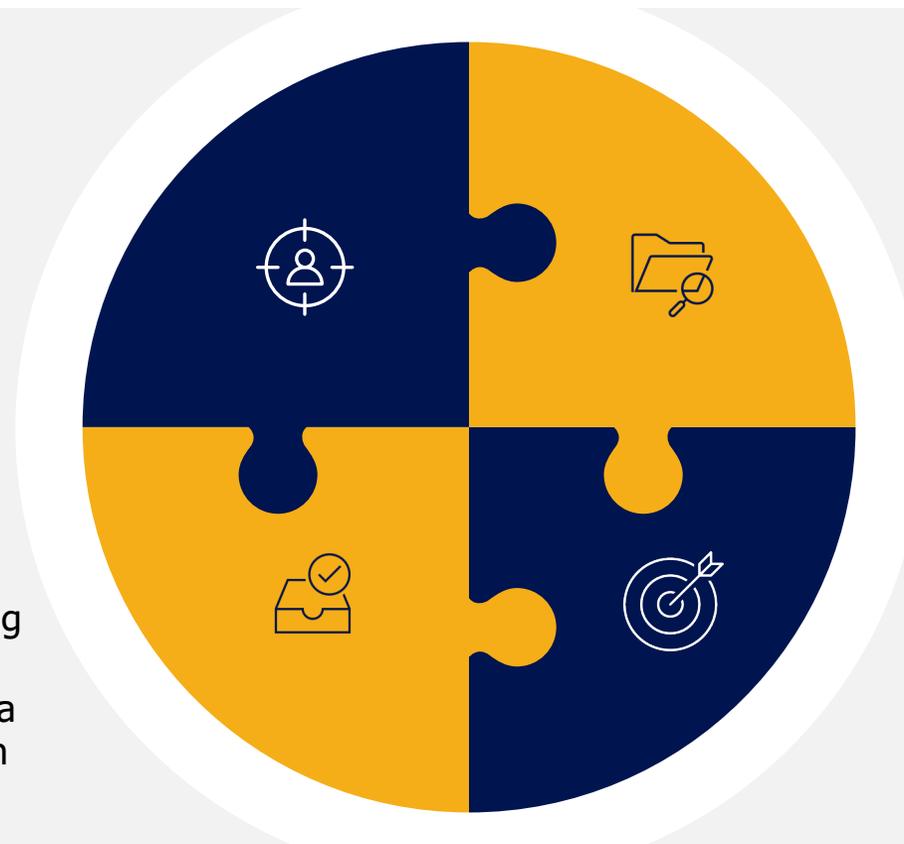
Menyediakan *record center*

untuk menyimpan arsip dinamis aktif terkait pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

Menyediakan Penyimpanan Elektronik

Penyimpanan elektronik membuka peluang laporan penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa termasuk penggunaan Dana Desa disusun secara sederhana dan ringkas, karena lampirannya tersedia di loker desa.

4



2

Menyediakan Loker Desa

agar desa-desa dapat menyimpan dokumen penting secara daring. Dokumen desa bisa disimpan, tanpa bisa dihapus, agar arsip desa tertata, tersimpan, dan tidak hilang meski berganti kepemimpinan

Menjadi sasaran dalam SDGs Desa

penyelenggaraan kearsipan di Desa, menjadi bagian dari pencapaian sasaran-sasaran, khususnya **SDGs Desa ke-16, ke-17, dan ke-18**

3

TERIMA KASIH

The background features a light gray gradient with several decorative elements. On the left and right sides, there are vertical bars of varying heights and thicknesses, some solid and some with thin white outlines. In the lower half, there are three horizontal, wavy bands that create a layered, paper-like effect. The top band is a darker shade of gray, the middle is a lighter shade, and the bottom is white. Small white dots are arranged in vertical columns within the wavy bands.



KEKUATAN ARSIP MARITIM PADA EKSTISTENSI & KEDAULATAN NEGARA

DR CONNIE RAHAKUNDINI BAKRIE

ARSIP MNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, BANYUWANGI 22 – 24 MEI 2023

Perang & Fungsi Kegunaan Arsip



SEBAGAI SUMBER
INFORMASI

ARSIP BERISIKAN
INFORMASI PENTING
MENYANGKUT SUATU
KEGIATAN ATAU PUN
ORGANISASI



SEBAGAI SUMBER
YURIDIS

ARSIP MENJELASKAN
HAK DAN KEWAJIBAN
YANG HARUS
DILAKUKAN OLEH
PIHAK BERSANGKUTAN



SEBAGAI SUMBER
SEJARAH

ARSIP MEMILIKI NILAI
KEGUNAAN SEJARAH



SEBAGAI SUMBER ILMU
PENGETAHUAN

ARSIP BERISIKAN
INFORMASI TENTANG
ILMU PENGETAHUAN





**NORTH
AMERICA**

EUROPE

ASIA

AFRICA

**SOUTH
AMERICA**

AUSTRALIA

ANTARCTICA

Indonesia & Samudera



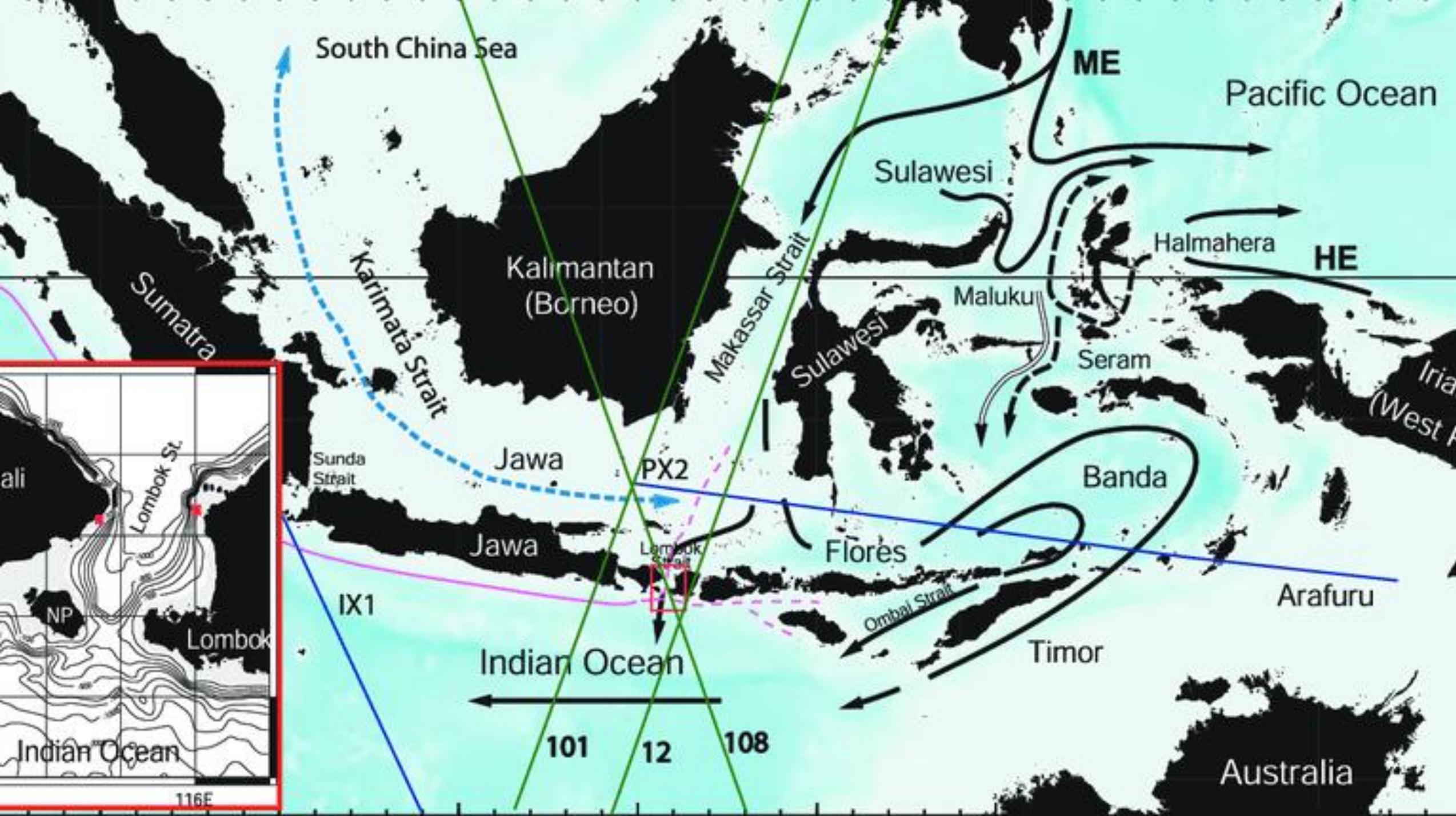
SAMUDRA PASIFIK, DENGAN LUAS 63.800.000 MIL PERSEGI. ADALAH RUMAH BAGI RUTE PERDAGANGAN PENTING, PELABUHAN, PERGERAKAN MANUSIA NON MANUSIA, DAN BERAGAM EKOSISTEM DAN KEHIDUPAN LAUT. SEKITAR 28% DARI LUAS PERMUKAAN DUNIA DAN MEMILIKI PALUNG TERDALAM DI BUMI, PALUNG MARIANAS, TEMPAT CHALLENGER DEEP BERADA. KEDALAMANNYA 36.037 KAKI, LEBIH TINGGI DARI GUNUNG EVEREST.

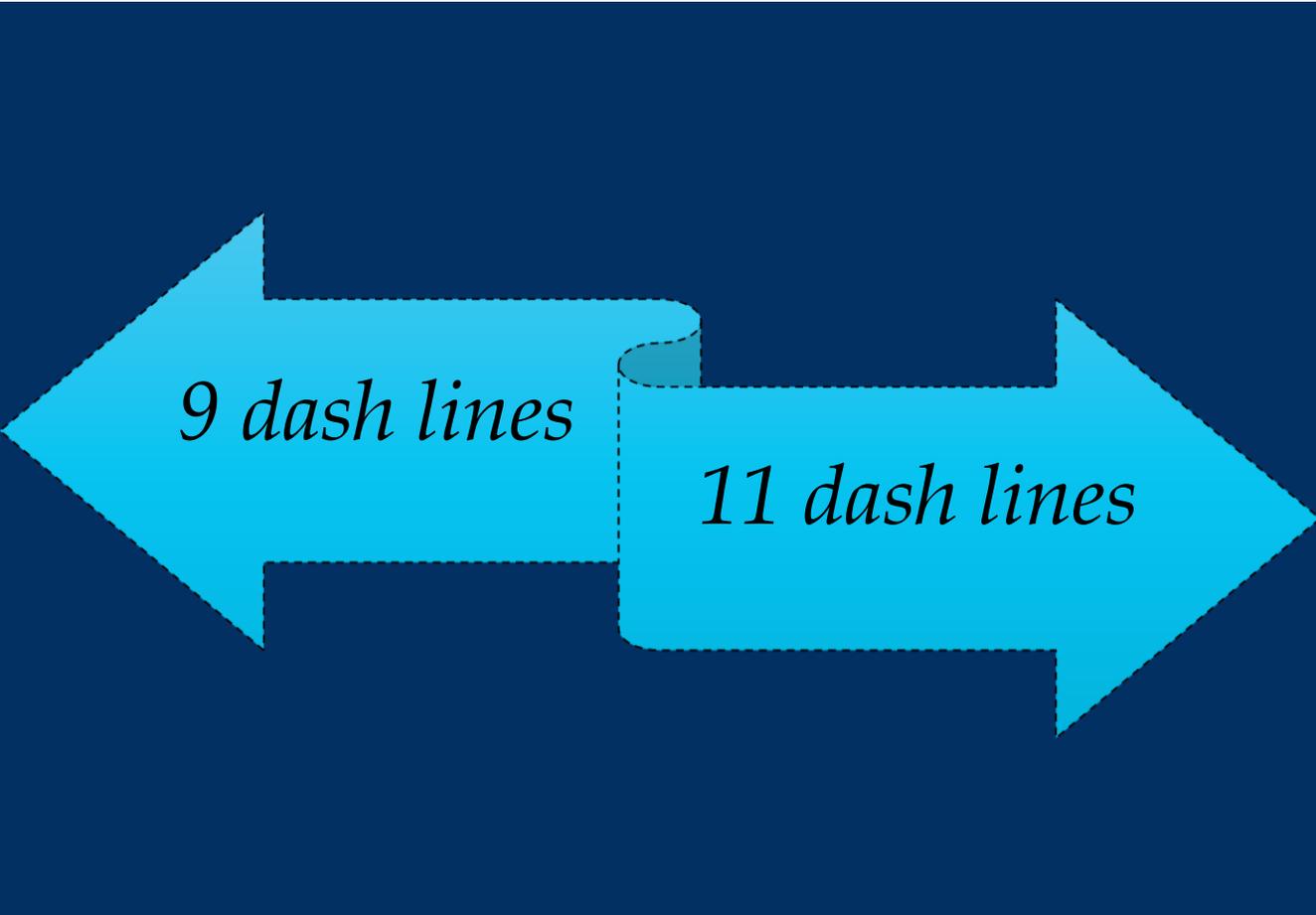


SAMUDRA HINDIA TERBESAR KETIGA DUNIA. LUAS: 27.240.000 MIL PERSEGI (70.560.000 KILOMETER PERSEGI), MENCAKUP SEKITAR 1/5 PERMUKAAN BUMI DAN MENCAKUP BANYAK PULAU TROPIS. BERBATASAN DENGAN AFRIKA DI BARAT LAUT, ANTARTIKA DI SELATAN, INDIA DAN ASIA DI UTARA, SERTA AUSTRALIA DI TIMUR TERMASUK LAUT ARAB DAN LACCADIVE. SAMUDRA HINDIA ADALAH YANG TERHANGAT DI DUNIA DAN MEMILIKI BEBERAPA PELABUHAN TERPENTING



PERAIRAN LAUT CINA SELATAN: 1.400.000 MIL PERSEGI (3.500.000 KILOMETER PERSEGI) ADALAH WILAYAH EKONOMI SANGAT PENTING - SETIDAKNYA 1/3 PELAYARAN DUNIA MELEWATINYA SETIAP TAHUN. PARA ILMUWAN MEMPERKIRAKAN AREA INI TERCIPTA SEKITAR 45 JUTA TAHUN YANG LALU. SAAT INI, TERDAPAT SEKITAR 250 PULAU KECIL





9 dash lines

11 dash lines

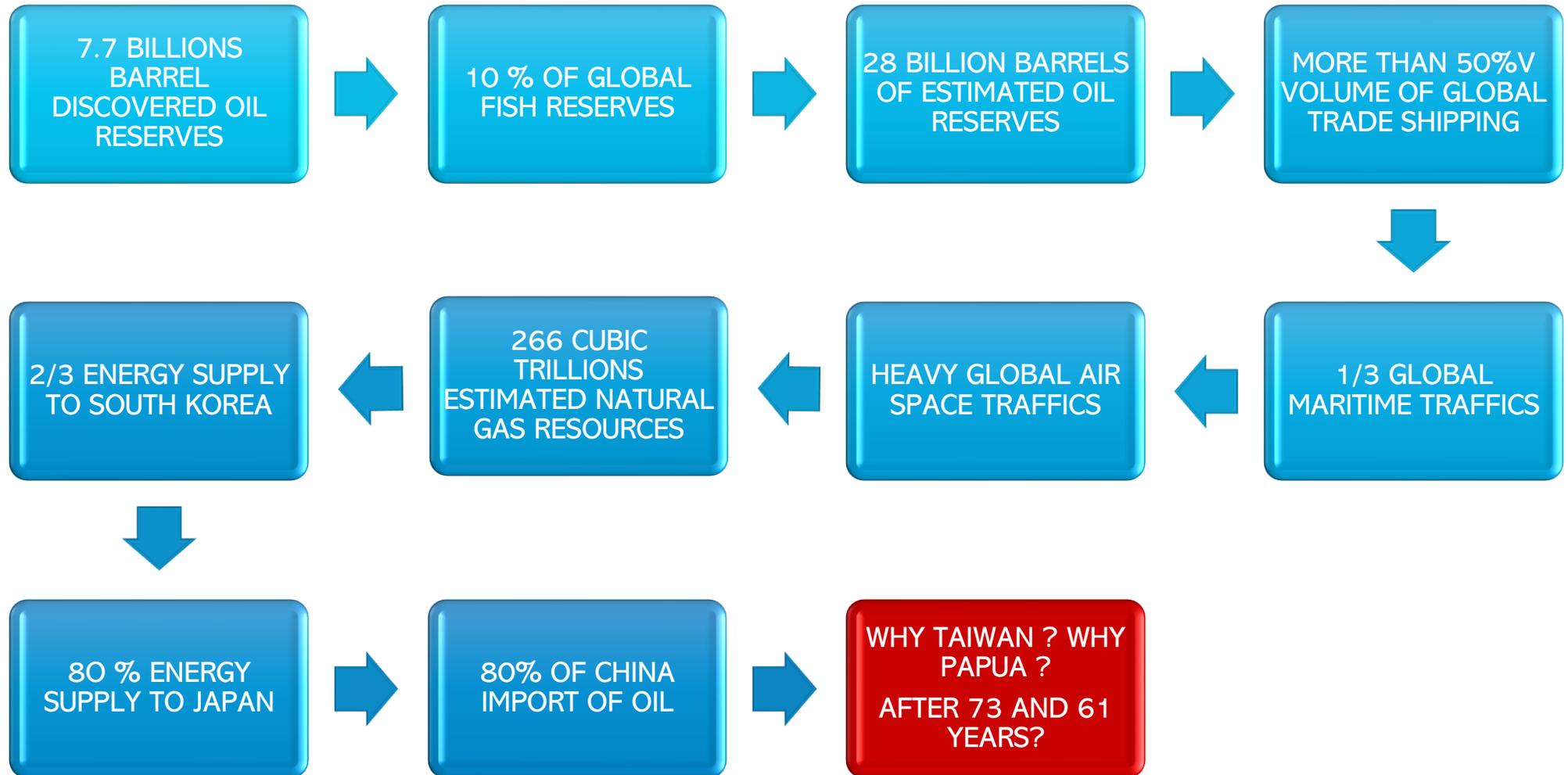
Historical Dash Lines Facts; Which China?

PETA SCS DIGAMBAR PADA
BULAN DESEMBER 1947

SECARA RESMI DITERBITKAN
OLEH KEMENTERIAN DALAM
NEGERI TAIWAN PADA
TAHUN 1948 SEBAGAI
TAMBAHAN UNTUK PETA
DIVISI ADMINISTRASI BARU
TAIWAN

TIDAK ADA PENJELASAN
RESMI TENTANG ARTI 11
GARIS PUTUS-PUTUS

The "Boiling Pot" of S.E.A Conflict



PRC & ROC Stand Points On SCS



Annexed Far Away Islands & China-Q

AFAA

MENURUT "DOKTRIN PENEMUAN TERRA NULIUS" DAN "DOKTRIN UTI POSSIDETIS"
DALAM HUKUM INTERNASIONAL

BRITANIA RAYA MASIH MENEMPATI BEBERAPA PULAU DI LAUT KARIBIA;
PRANCIS MENGANGGAP PULAU KALEDONIA BARU DAN PULAU POLINESIA
PRANCIS SEBAGAI WILAYAH SEBERANG LAUTNYA; AS MENGAMBIL PULAU
PASIFIK BARAT GUAM SEBAGAI WILAYAH YANG TIDAK BERHUBUNGAN

SEBAGIAN BESAR PULAU-PULAU DI LAUT AEGEA ANTARA YUNANI DAN TURKI
LEBIH DEKAT KE TURKI DALAM JARAK TETAPI MALAH MILIK YUNANI.

APA YANG MEMBUAT POSISI BARAT UNGGUL DAN MASALAH SCS DIANGAP DAN
DIKONDISIKAN BERBEDA DARI KASUS DI ATAS?

China Archives : Power of Occupation History

CHINA ADALAH NEGARA PERTAMA YANG MENEMUKAN DAN MENYEBUTKAN LCS DAN KEPULAUANNY PADA ERA DINASTI HAN TIMUR (206 SM-220 M)

SEPERTI TERTULIS DALAM BUKU "YI WU ZHI" OLEH YANG FU SELAMA DYNASTI TANG (618-907) DAN SONG (960-1279), PULAU XISHA DAN NANSHA MASING-MASING DISEBUT "1000 Mil PASIR" (QIAN LI CHANG SHA) DAN "1000 Mil BATU" (WAN LI SHI TANG)

DINASTI SONG MENINGKATKAN KEKUATAN AL UNTUK MELINDUNGI PERAIRAN DAN PERBATASAN DARATNYA SERTA MELAKUKAN MISI MARITIM LUAR NEGERI

DINASTI SONG MEMEGANG PERAN PENTING SELAMA KONSOLIDASI EMPIRE DI ABAD KE-10. TIAP KAPAL PERANG MEREKA MAMPU MEMBAWA 1.000 TENTARA K

TERTULIS PADA BUKU CATATAN "GENG LU BU" DI ERA DINASTI MING DAN QING, RUTE LAUT MEREKA DAN MENAMAI PULAU-PULAU DI LCS TERCATAT PADA VBUKU "DAO YI ZHI LUE" DITULIS OLEH WANG DAY NAN

CATATAN LENGKAP DINASTI YUAN MEMBERIKAN RINCIAN KEPULAUAN NANSHA.



ADA TOTAL 347 TREATIS MILITER TERTULIS SELAMA PERIODE DINASTI SONG DAN TEREKAM DALAM TEKS SEJARAH SONG SHI DI 1345

EMPEROR HONGWU MENGGERAKAN EKSPEDISI LAUT MING DIMANA 50 JUTA POHON DITANAM DI 1391 UNTUK PERSIAPAN PROYEK PEMBANGUNAN KAPAL MASIF

DI AKHIR QING DINASTY CINA MELAKUKAN PROTES ATAS INVASI JERMAN DAN PERANCIS KE PULAU NANSHA. TAHUN 1946

CHINA MENGIRIM KAPAL PERANG KE SELURUH AREA LAUT CHINA SELATAN TERMASUK PULAU XISHA DAN NANSHA UNTUK PATROLI



Arsip Dan Sejarah Dalam Kasus Sipadan Ligitan

Sengketa Indonesia vs. Malaysia



War & The Power Of Archives

TZMKO

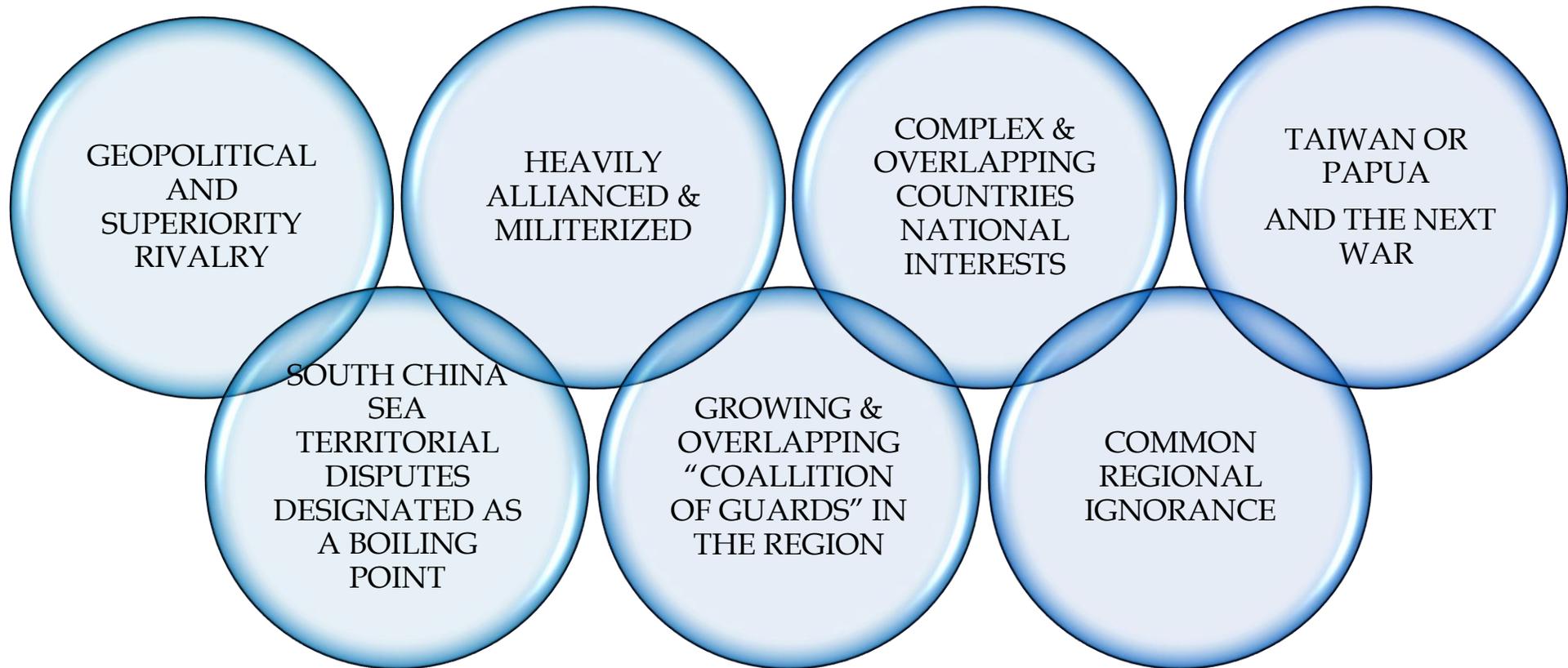


```
graph TD; A[TZMKO] --> B[DEKLARASI JUANDA]; B --> C[UNCLOS];
```

DEKLARASI
JUANDA

UNCLOS

Indo Pacific Security & Our Diverse Characteristic



French Military Forces In The Indo Pacific



3 Reasons : UK Tilt Towards The Indo Pacific



SEBAGAI KAWASAN
MESIN PERTUMBUHAN
DUNIA



MENJAGA KEBEBASAN
DAN KEAMANAN
NAVIGASI DI WILAYAH
KOMPETISI GEOPOLITIK
BERIKUT POTENSI
FLASHPOINTS



MEMPROMOSIKAN NILAI
TENTANG MASYARAKAT
TERBUKA DALAM
MENJAGA ATURAN SERTA
NORMA INTERNASIONAL



Papua Era Helenistik Romawi



SEKITAR TAHUN 200 M, AHLI GEOGRAFI BERNAMA KLAUDIUS PTOLEMAEUS (PTOLAMY) MENYEBUT PULAU PAPUA DENGAN NAMA LABADIOS.

IA ADALAH SEORANG AHLI GEOGRAFI, ASTRONOM, DAN ASTROLOG YANG HIDUP PADA ZAMAN HELENISTIK ROMAWI DAN PENULIS RISALAH ILMIAH :

1. RISALAH ASTRONOMI ALMAGEST (RISALAH BESAR).

2. GEOGRAPHIA, MENGENAI PENGETAHUAN GEOGRAFI HELENISTIK.

3. RISALAH ASTROLOGI TETRABIBLOS (EMPAT BUKU), MENGADAPTASI ASTROLOGI HOROSKOP KE FILOSOFI ALAM ARISTOTELIAN.





EVROPA

ASIA

AFRICA

ETHIOPIA INTERIOR

MARE INDICIVM

MARE INDICIVM

PRAESODVM

MARE

10 24 30 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88

92 104 110 114 120 124 130 134 140 144 150

Grada longitudinis ab oriente in occidentem

Sejarah Papua 500 – 1300 M



500 M OLEH BANGSA TIONGKOK PAPUA DIBERI NAMA TUNGKI. DIKETAHUI DARI CATATAN HARIAN SEORANG PEDAGANG TIONGKOK GHOU YU KUAN



600 M, KERAJAAN SRIWIJAYA MENYEBUT NAMA PAPUA SEBAGAI JANGGI



ERA 700 M, PEDAGANG PERSIA, GUJARAT DAN INDIA BERDATANGAN KE PAPUA. MENYEBUT PAPUA DENGAN NAMA DWI PANTA DAN SAMUDRANTA YANG ARTINYA UJUNG SAMUDRA DAN UJUNG LAUTAN.



TAHUN 1300AN, KERAJAAN MAJAPAHIT MENYEBUTNYA DENGAN NAMA, "WANIN" DAN "SRAN".

WANIN, MENUNJUK PADA SEMENANJUNG ONIN DI DAERAH FAK-FAK. SEDANGKAN "SRAN" MENGACU PADA PULAU SERAM DI MALUKU

Sejarah Papua 1400 M

TAHUN 1400AN, KEPULAUAN PAPUA DIKUASAI OLEH KERAJAAN TIDORE .NAMA PAPUA BERASAL DARI KATA PAPO-UA, DI DALAM BAHASA TIDORE, BERARTI TIDAK BERGABUNG ATAU TIDAK BERSATU, YANG ARTINYA DI PULAU INI TIDAK ADA RAJA YANG MEMERINTAH.

KERAJAAN TERNATE, MEMILIKI WILAYAH SEBELAH BARAT; PESISIR TIMUR SULAWESI, TERMASUK SULE DAN KEPULAUAN BANGGAI, SERAM DAN KEPULAUAN AMBON.

KERAJAAN TIDORE MENGUASAI BAGIAN TIMUR, DARI KEPULAUAN RAJA AMPAT HINGGA PERBATASAN PAPUA DENGAN PAPUA NUGINI SEKARANG.

KERAJAAN TIDORE MENGORGANISIR WILAYAHNYA TERSEBUT MENJADI - KORANO NGARUHA - ARTINYA KEPULAUAN RAJA AMPAT, PAPO UA GAMSIO (PAPO UA SEMBILAN NEGERI) DAN MAFOR SOA RAHA (MAFOR EMPAT SOA) BERADA DALAM KENDALI TIDORE

Sejarah Papua 1511 - 1770

1511 M, ANTONIO D'ARBAU
PELAUT PORTUGIS MENYEBUT
WILAYAH PAPUA DENGAN NAMA
"OS PAPUAS" ATAU LLHA DE PAPO

DON JORGE DE MENETES, PELAUT
SPANYOL MAMPIR DI PAPUA (1526
– 1527)
TETAP MENGGUNAKAN NAMA
PAPUA

JURU TULIS PELAYARAN
MAGELHAENS - FIGAFETTA - YANG
IKUT MENGELILINGI DUNIA
MENYEBUT JUGA DENGAN NAMA
PAPUA SAAT SINGGAH DI TIDORE.

1528 M, ALVARO DE SAVEDRA,
PIMPINAN ARMADA LAUT
SPANYOL MEMBERI NAMA PULAU
PAPUA ISLA DE ORO - ARTINYA
PULAU EMAS.

1545 M, PELAUT SPANYOL INIGO
ORTIZ DE RETES MEMBERI NAMA
NUEVA GUINEA ATAU GOVA
GUINEA (PULAU GUINEA BARU),
KARENA MELIHAT CIRI-CIRI SAMA
SEPERTI MANUSIA DI BELAHAN
AFRIKA BERNAMA GUINEA

1606 M, EKSPEDISI DUYFKEN
DIPIMPIN OLEH KOMANDAN
WILIAM JANSEN DARI BELANDA
MENDARAT DI PAPUA.
DENGAN MELUASNYA KEKUASAAN
BELANDA, PADA 1663, SPANYOL
MENINGGALKAN PAPUA.

1770, BELANDA MENGUBAH
NAMA PAPUA MENJADI NIEUW
GUINEA (TERJEMAHAN KE DALAM
BAHASA BELANDA ATAS GOVA
GUINEA ATAU NOVA GUINEA)

Sejarah Papua 1774-1828



1774, KEKUASAAN BELANDA ATAS PAPUA JATUH KE TANGAN INGGRIS.



1775, NAKHODA KAPAL LA TARTARE KAPTEN FORREST DARI INGGRIS BERLABUH DI MANOKWARI, TELUK DORERI



1793, PAPUA MENJADI DAERAH KOLONI BARU. BERDASARKAN PERINTAH GUBERNUR INGGRIS BERKEDUDUKAN DI MALUKU YANG MEMBAGI GARIS PULAU DAN MENDIRIKAN BENTENG CORONATION DI TELUK DORERI. **NAMUN KAMALUDIN SYAH, SULTAN TIDORE YANG BERKUASA ATAS SELURUH KESULTANAN TIDORE MENENTANG PENDIRIANNYA, SEHINGGA PADA 1814, INGGRIS MENINGGALKAN PAPUA.**



24 AGUSTUS 1828 BERDIRI BENTENG FORT DU BUS DI TELUK TRINTON OLEH A.J. VAN DELDEN SEBAGAI PENANDA MULAINYA KOLONIALISME BELANDA DI PAPUA DENGAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN DENGAN TIGA RAJA YAITU RAJA NAMATOTA, KASA (RAJA LAHAKIA) DAN LUTU (ORANG KAYA DI LOBO, MEWARA DAN SENDAWAN). **MEREKA MENDAPATKAN PENGAKUAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DIBAWAH SULTAN TIDORE**



Arsip Membangkitkan Peradaban Maritim (Visi Poros Maritim Dunia)

NENEK MOYANGKU ORANG PELAUT

Indonesia & Laut

KAPAL-KAPAL YANG KITA TEMUI SAAT INI ADALAH KAPAL BESAR, KOKOH, DAN DAPAT DIGERAKKAN DAN DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT KARGO MELINTASI LAUTAN DAN SAMUDRA.

INI TIDAK TERJADI DI ABAD YANG LALU, KARENA KAPAL SAAT INI TELAH MENGALAMI PERKEMBANGAN BERABAD-ABAD YANG TAK TERHITUNG JUMLAHNYA HINGGA MENJADI SEPERTI SEKARANG ...



Sejarah Perairan Dunia

Sejarah kelautan kuno membuat studi menarik tentang kekuatan dan naluri bertahan hidup manusia . Misalnya, pada zaman kuno, dayung sederhana tidak digunakan. Sebaliknya orang menggunakan tangan mereka untuk mendayung di perahu kecil mereka.

Dayung lalu dirancang untuk digunakan di perairan yang lebih dalam. belakangan, lagi dengan cerdas diubah menjadi dayung yang dipasang di sisi perahu.

Penemuan layar adalah titik balik terbesar dalam sejarah maritim. Layar menggantikan otot manusia dan perahu layar dapat memulai perjalanan yang lebih jauh dengan beban lebih berat

Orang Fenisia membuat galai dengan layar dan dayung yang menyediakan tenaga. Karena galai-galai bertambah besar, menurut spesifikasi dan persyaratan, para pendayung diatur dalam dua tingkat disebut biremes oleh orang Yunani dan Romawi. Mereka juga membangun trireme yaitu galai dengan tiga baris dayung.

Pada 1000 M, kapal Viking Long yang terkenal melakukan perjalanan ke Mediterania. Kapal-kapal ini lebih lebar dan memiliki desain pijakan tiang yang lebih maju. Pada 800 M, terbentuk alternatif dari desain kapal Eropa utara, hulk mulai populer

Perdagangan luar negeri menjadi semakin penting. Menjelang akhir tahun 1100-an, tiang buritan lurus ditambahkan untuk memfasilitasi kemudi gantung. Aspek ini sangat meningkatkan karakteristik penanganan kapal. Kemudi memungkinkan kapal yang lebih besar dirancang...

The Different of Ship And Boat

Sebuah kapal dapat membawa perahu, tetapi sebuah perahu tidak dapat membawa sebuah kapal

UKURAN
KAPAL

WILAYAH
OPERASI

TEKNOLOGI
NAVIGASI

BESARAN
KRU

KAPASITAS
KARGO

KONSTRUKSI
DAN DESAIN

PROPULSI

NAVIGASI LAUT

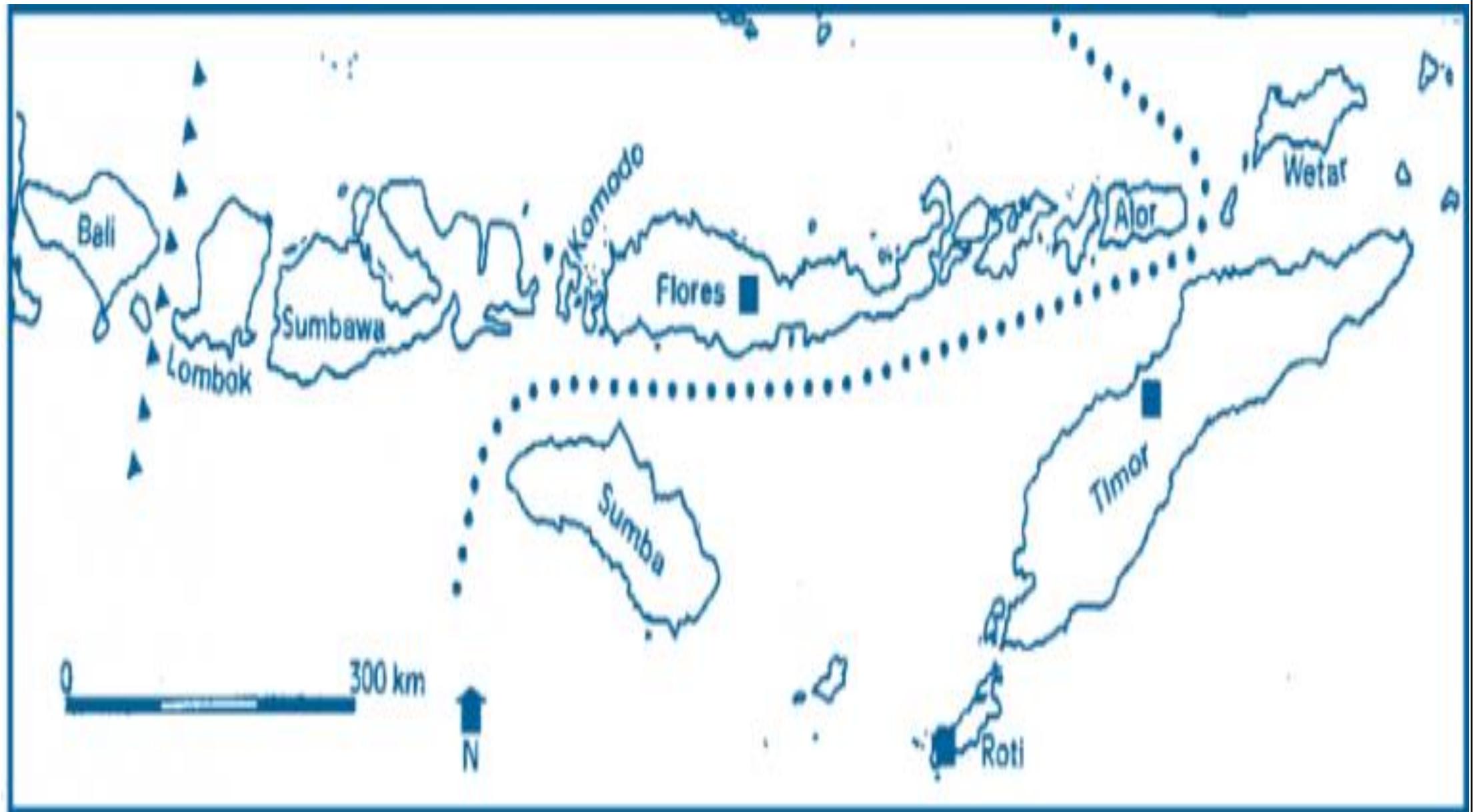
Navigasi laut terbukti telah dimulai dalam urutan satu juta tahun yang lalu. Bukti paling awal tersedia dari Nusa Tenggara, Indonesia....

Sejarah maritim umat manusia dimulai tidak beberapa ribu tahun yang lalu, seperti yang cenderung diasumsikan oleh arkeologi bahari tradisional, tetapi seratus kali lebih tua (Sondaar et al., 1994; Bednarik, 1997, 1999a; Brumm et al., 2010).

Data arkeologi dari Wallacea (Indonesia) menunjukkan bahwa sejarah pelayaran dimulai pada akhir Pleistosen Awal, setidaknya 900.000 tahun yang lalu. Untuk lebih memahami besarnya teknologi dari pencapaian maritim yang sangat awal ini, ekspedisi dilakukan oleh sejumlah peneliti dan terlibat dalam serangkaian eksperimen replikasi.

Sejauh ini, bukti pelayaran yang paling luas dan tertua berasal dari Indonesia, teknologi ini pertama kali dikembangkan sekitar satu juta tahun yang lalu. Bukti pendudukan hominin pada akhir Pleistosen Bawah dan Pleistosen Tengah muncul di tiga pulau di Nusa Tenggara, yang sebelumnya disebut Kepulauan Sunda Kecil: Flores (Verhoeven, 1958; Maringer & Verhoeven, 1970; Sondaar et al., 1994; Morwood et al., 1998), Roti (Bednarik, 1999a) dan Timor (Bednarik & Kuckenburger, 1999).

Perkakas batu awal Flores terbukti berusia hingga 840.000 tahun dengan berbagai metode penanggalan, termasuk jalur fisi, paleomagnetisme, geologi, paleontologi, dan keberadaan tektit yang dapat didata. Beberapa strata yang berisi penemuan alat-alat batu dalam kasus Timor, sisa-sisa hewan ditutupi oleh fasies batu Kuartar padat, di tempat-tempat dengan ketebalan lebih dari 150 meter (Bednarik, 2003). Oleh karena itu, bukti luar biasa tidak ini tidak dapat disangkal



Manusia Flores vs. Acheulian

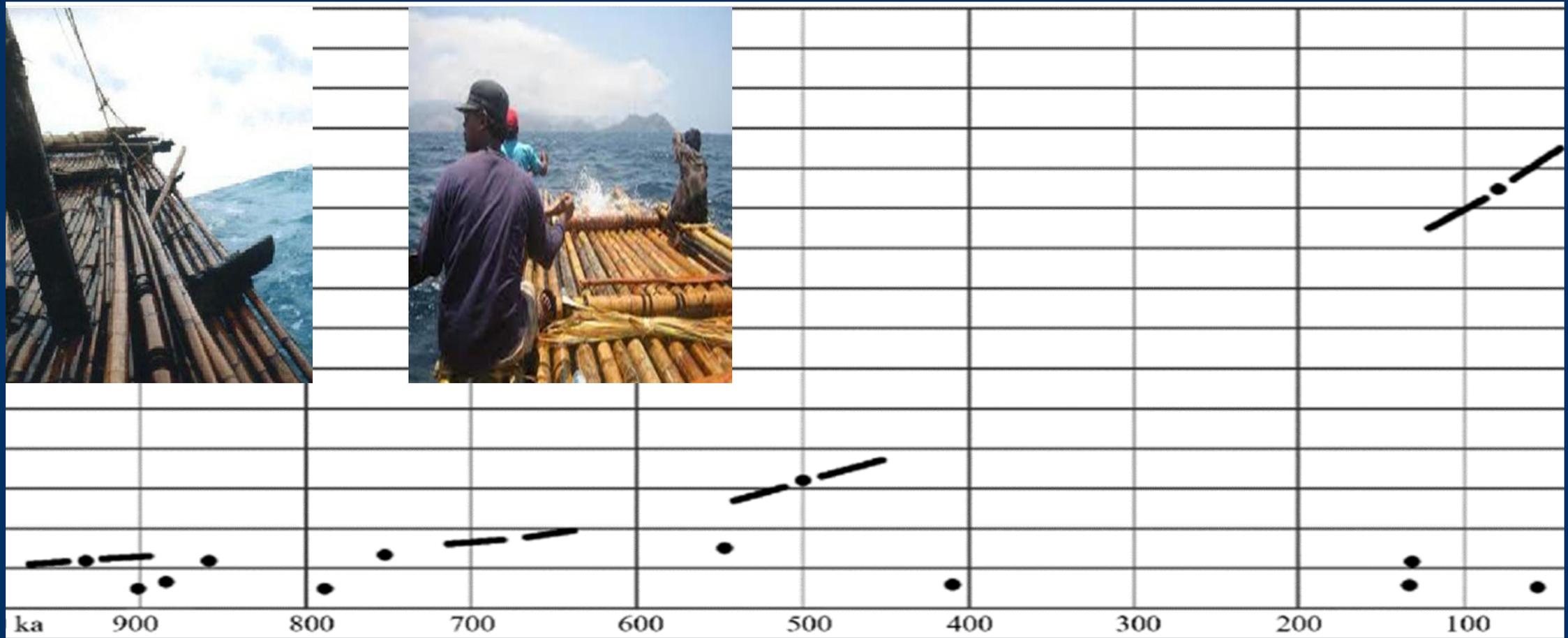
1 juta tahun lalu..

- *Untuk mencapai Flores, manusia penjelajah pertama-tama harus menyeberang ke Lombok, dari sana ke Sumbawa, dan kemudian melalui Komodo ke Flores. Penyeberangan ini menuntut penggunaan perahu*
- *Sekitar satu juta tahun yang lalu penggunaan navigasi pertama kali muncul di Jawa dan Bali, untuk mengeksplorasi daerah penangkapan ikan lepas pantai. Hal ini menyebabkan kemampuan melintasi perairan lebih dari 30 km dari pesisir*

840.000 tahun lalu...

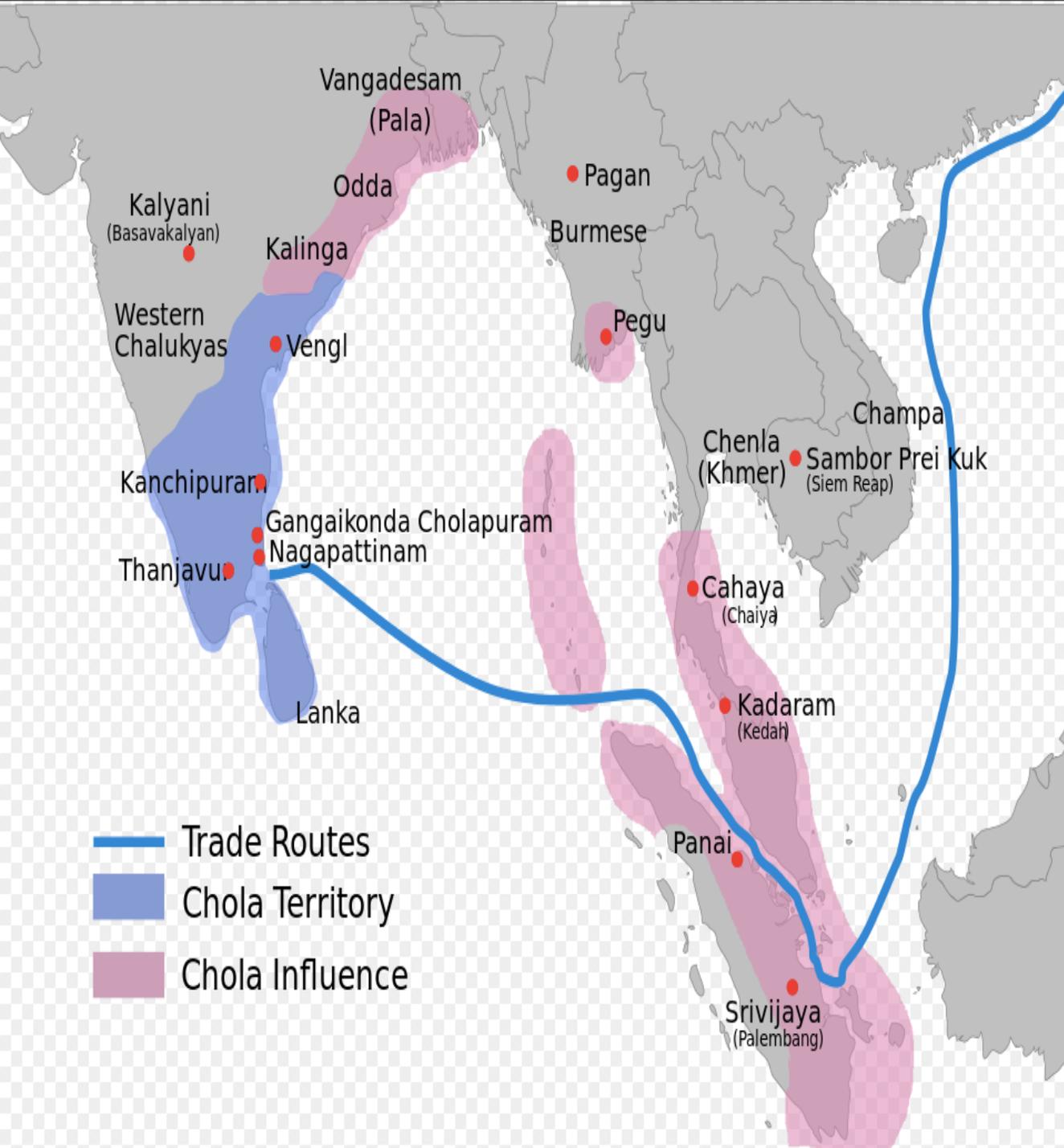
- *840.000 tahun lalu, tantangan2 laut telah ditaklukan leluhur kita dan Flores memiliki populasi homo erectus yang secara arkeologis sangat jelas*
- *Sekitar waktu yang sama, pelaut Acheulian dari barat laut Afrika berhasil menyeberang ke Gibraltar, yang jaraknya hanya antara 10 dan 14 km*
- *Sedangkan pelaut Indonesia SUDAH mampu menaklukkan jarak antara 60 dan 100 km, dari Alor ke Timor.*

Perkiraan waktu kolonisasi maritim pertama (dalam ribuan tahun) diplot terhadap perkiraan jarak pantai (bukan jarak tempuh) pada saat perjalanan, menunjukkan bagaimana jarak tempuh meningkat secara bertahap seiring waktu. Garis putus-putus menunjukkan perkiraan kemampuan navigasi maksimal manusia



SRIVIJAYA EMPIRE AROUND 8TH CENTURY. EXPANDING FROM SUMATRA, CENTRAL JAVA, TO MALAY PENINSULA. THE RED ARROWS SHOW THE SERIES OF SRIVIJAYAN EXPEDITION AND CONQUEST, IN DIPLOMATIC ALLIANCES, MILITARY CAMPAIGN, OR NAVAL RAIDS.





Flags

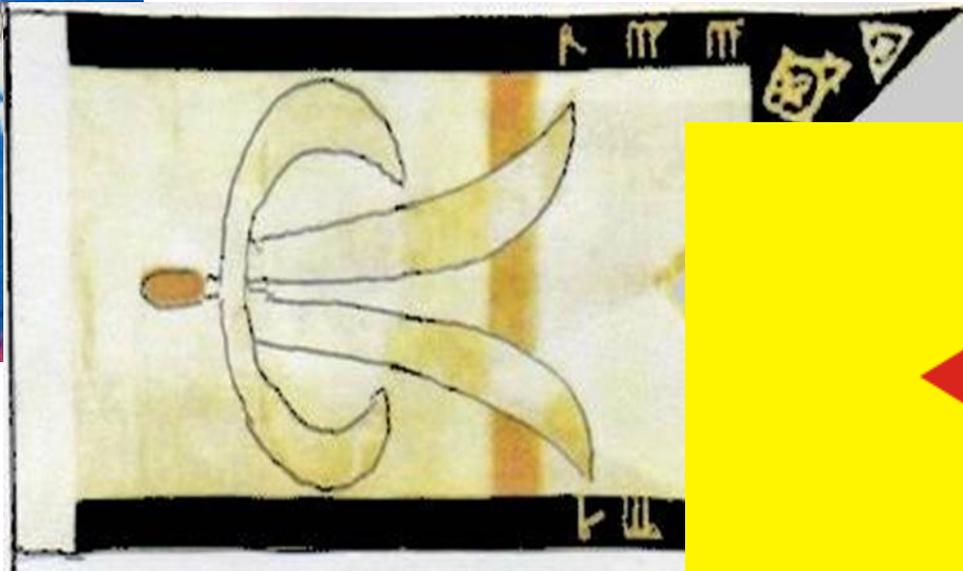
Flag of the most important little kingdom (total of 22 kingdoms today in the Kei Is., Eastern Indonesia). The King is called the "Rat". The dragon is called "Lor Lim", the spear is called "Ngabai", the hoist is next to the spear, and there is a red frill on all four sides. John McMeekin, 19 August 2015



BENDERA CHALIFA or Battalion Flag, this flag is 1.27m X 1.75m long, it reads at the top, the usual Moslem phrase, "there is no God but God & Muhammad is his Prophet", below in the disc is "SULTAN OF TIDORE".



TRUMON War flag (taken in battle 16th Cent.), I have done a line drawing over the top one to show where the Zulfiqar Sword is. The Batak King, Raja Sisingamngaraja XII of Sinambela flew a similar flag, but this was coloured red & white, he reigned 1871 until he was killed by the Dutch in 1907).



- State flag of Jogjakarta, The Royal Standard (yellow with a red star - seen on TV when Queen Elizabeth II visited Sultan Hamengku Burwono IX in the 1970's).



Eksplorasi & Eksploitasi

KISAH EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI. PERTEMUAN ANTARA ORANG EROPA DAN TE-MOANANUI-A-KIWA (PENDUDUK DI SAMUDRA PASIFIK), DAN WARISANNYA

SAMUDRA HINDIA DAN PASIFIK ADALAH SAMUDRA TERBESAR DI DUNIA, BAGAIMANA PELAYARAN NENEK MOYANG INDONESIA KE LAUTAN YANG MENGUBAH DUNIA SELAMANYA, DAN WARISAN SERTA TRADISI DI SANA SAAT INI.

KISAH PELAYARAN SAMUDRA HINDIA PASIFIK, DAN EKSPEDISI YANG DIPIMPIN OLEH KERAJAAN MARITIM DAN KESULTANAN NUSANTARA

PENGETAHUAN LINGKUNGA SELAMA EKSPEDISI.

SEJARAH PEMBUATAN KAPAL PASIFIK, NAVIGASI, DAN KISAH PARA MISIONARIS YANG MEMPERKENALKAN, DAN DALAM BEBERAPA KASUS, MEMAKSAKAN AGAMA KRISTEN PADA PENDUDUK PULAU, YANG PRAKTIK DAN KEPERCAYAANNYA MEREKA COBA LARANG

PETA, BAGAN & ATLAS, PERDAGANGAN MARITIM / BAHARI, DIREKTORI, REFERENSI, PELAYARAN, PELABUHAN, SUNGAI, TELUK DAN PETA DUNIA

KOTA PELABUHAN NUSANTARA; KUMPULAN FOTO RENCANA PELABUHAN, DAN DERMAGA (CONTOH : PERPUSTAKAAN KONGRES).

MENGEMBANGKAN RASA KOMUNITAS YANG KUAT, KEPERCAYAAN DIRI INDIVIDU DAN PENGAKUAN KEKUATAN PERBEDAAN DI ANTARA KITA

Rekonfigurasi Geoekonomi Dunia

WHILE PRIMARILY A GEOPOLITICAL EVENT, THE RUSSIAN - UKRAINE WAR WILL PROFOUNDLY RECONFIGURE GLOBAL GEOECONOMICS (THE INTERSECTION OF ECONOMY AND GEOGRAPHY)

INCLUDE INFRASTRUCTURE-BASED CONNECTIVITY INITIATIVES SUCH AS CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI), THE EUROPEAN UNION'S GLOBAL GATEWAY, THE U.S.-LED BLUE DOT NETWORK (BDN), THE G-7'S BUILD BACK BETTER WORLD (B3W), JAPAN'S QUALITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT (QII), RUSSIA'S EURASIAN ECONOMIC UNION (EAEU), AND THE INTERNATIONAL NORTH-SOUTH TRANSPORT CORRIDOR (INSTC) DRIVEN BY RUSSIA, IRAN, AND INDIA.





terima kasih